

MENJEMBATANI PERBEDAAN AGAMA MELALUI PENDIDIKAN : STUDI TENTANG GURU KRISTEN YANG MENGAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SULAWESI UTARA

Faradila Hasan

Institut Agama Islam Negeri Manado

Jalan S.H. Sarundajang, Malendeng, Kec. Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara

Email: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena guru Kristen yang mengajarkan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara, di mana Muslim merupakan minoritas. Melalui wawancara, observasi, dan keterlibatan masyarakat, kami mengeksplorasi praktik pendidikan yang unik ini dari berbagai perspektif: alasan di balik penugasan guru-guru Kristen untuk mengajar studi Islam, metode dan materi pengajaran mereka, pengalaman siswa dan orang tua, dan bagaimana praktik ini mempengaruhi pemahaman dan toleransi beragama siswa. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Indonesia yang beragam mengadaptasi kebijakan pendidikan untuk membangun pemahaman dan rasa hormat antar agama. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif di kelas PAI. Penelitian kami dilakukan di dua sekolah (satu sekolah negeri dan satu sekolah swasta Kristen) di Sulawesi Utara, di mana Pendidikan Agama Islam diajarkan secara unik oleh guru-guru Kristen. Kemudian dilakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penugasan guru Kristen dilatarbelakangi ketiadaan guru PAI yang berkualifikasi. Ditemukan adanya kesenjangan konten dan metode pembelajaran dengan standar nasional, serta dampak yang belum optimal bagi pencapaian kompetensi keagamaan siswa, meskipun mereka menunjukkan toleransi beragama yang baik. Fenomena ini mencerminkan urgensi kebijakan afirmatif untuk pemerataan guru PAI yang kompeten, pengembangan model pembelajaran agama yang inklusif, serta tata kelola pendidikan agama yang kolaboratif dalam konteks keragaman. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus pendidikan agama di masyarakat multikultural dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjembatani keberagaman dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Keywords: *Pendidikan Agama Islam, Guru Kristen, Minoritas Muslim, Kebijakan Pendidikan, Keragaman Agama*

Abstract

This research aims to investigate the phenomenon of Christian teachers teaching Islamic Religious Education (PAI) in schools across North Sulawesi, where Muslims are a minority. Through interviews, observations, and community engagement, we explore this unique educational practice from multiple perspectives: the rationale behind assigning Christian

teachers to teach Islamic studies, their teaching methods and materials, the experiences of students and parents, and how this practice influences students' religious understanding and tolerance. This research provides insights into how diverse Indonesian communities adapt educational policies to build interfaith understanding and respect. Data was collected through participatory observation in PAI classrooms. Our research was conducted in two schools (one public school and one Christian private school) in North Sulawesi, where Islamic Religious Education is uniquely taught by Christian teachers. In-depth interviews were conducted with school principals, teachers, students, parents, and community leaders, along with documentary studies. Data analysis followed the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the assignment of Christian teachers was necessitated by the absence of qualified PAI teachers. Gaps were identified between the content and teaching methods compared to national standards, as well as suboptimal impacts on students' religious competency achievement, although they demonstrated good religious tolerance. This phenomenon reflects the urgency for affirmative policies to ensure equitable distribution of competent PAI teachers, development of inclusive religious learning models, and collaborative religious education governance in diverse contexts. This research contributes to the discourse on religious education in multicultural societies and provides policy recommendations for bridging diversity in achieving national educational objectives.

Keywords: *Islamic Religious Education, Christian Teachers, Muslim Minorities, Education Policy, Religious Diversity*

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, merupakan bukti keberagaman agama dan budaya. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, negara ini adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, di samping komunitas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya (Hefner, 2000, 2018, 2021). Keberagaman ini diabadikan dalam ideologi nasional Pancasila, yang menekankan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sambil menghormati pluralisme agama (Anwar, 2021; Chia, 2022). Namun, penerapan kerangka ideologis ini di bidang pendidikan menghadapi tantangan unik, terutama di wilayah dimana demografi agama menyimpang dari norma nasional.

Konstitusi Indonesia dan undang-undang terkait, termasuk Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak setiap siswa untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, yang diajarkan oleh pendidik dari agama yang sama (Rosyada & Nata, 2020; Sujatmoko, 2010). Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memelihara identitas agama dan persatuan nasional. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berbeda dari ideal ini, terutama di daerah di mana kelompok agama tertentu merupakan minoritas.

Contoh mencolok dari perbedaan ini dapat ditemukan di Provinsi Sulawesi Utara, di mana situasi pendidikan agama sering kali tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di wilayah ini, terdapat sekolah-sekolah, yang namanya disamarkan, di mana guru Kristen seringkali dihadapkan pada tugas yang tidak biasa, yaitu memberikan pendidikan agama Islam kepada siswa Muslim yang merupakan minoritas di sekolah tersebut.

Keberadaan fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai berbagai aspek pendidikan agama. Pertama, ada kekhawatiran mengenai kualitas pendidikan agama yang diberikan. Apakah guru-guru yang bukan berasal dari latar belakang agama yang sama dengan siswa mampu memberikan pengajaran yang mendalam dan sesuai dengan keyakinan agama siswa? Kedua, pelestarian hak konstitusi siswa menjadi isu penting. Apakah hak siswa untuk menerima pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka tetap terjamin dalam situasi ini? Terakhir, fenomena ini memiliki implikasi yang lebih luas untuk toleransi agama dan pemahaman antaragama di Indonesia. Bagaimana pengalaman siswa dan guru dalam konteks ini mempengaruhi sikap mereka terhadap keberagaman agama dan kerjasama antar agama dalam masyarakat yang lebih luas?

Pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan perhatian dan penelitian lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan agama dapat diterapkan dengan adil dan efektif, sambil mempromosikan toleransi dan pemahaman yang lebih baik di tengah keberagaman. Literatur yang ada tentang pendidikan agama di Indonesia sebagian besar berfokus pada kebijakan tingkat nasional dan penerapannya di pusat kota besar atau daerah dengan mayoritas Muslim (Idrus, 2014; Jackson & Parker, 2008; Listia & Gogali, 2007; Mariana & Helmi, 2022; Nurwanto & Cusack, 2017; Raihani, 2018; Saifuddin, 2015). Penelitian telah mengeksplorasi peran pendidikan agama dalam membentuk identitas nasional (Andersland, 2019; Idris et al., 2012; Schnabel & Hjerm, 2014; Zambeta, 2000), mempromosikan toleransi (Fuhr, 1996; Hansen, 2013; Mamlok, 2023; Prior et al., 2001), dan menavigasi hubungan kompleks antara negara dan agama di bidang pendidikan (Fraser, 2016; Kühle et al., 2018; Ladeur, 2008; Sacerdote & Glaeser, 2001). Namun, terdapat kesenjangan yang mencolok dalam penelitian mengenai tantangan unik yang dihadapi oleh siswa minoritas agama dalam mengakses pendidikan agama yang sesuai, terutama di daerah yang mayoritas masyarakatnya non-Muslim.

Studi terbaru di bidang ini telah menyoroti ketegangan antara komitmen konstitusi Indonesia terhadap pendidikan agama dan realitas praktis penerapannya dalam masyarakat

yang beragam. Para peneliti seperti Bader (2003), Barnes dan Davis (2015) dan Nord (2014) telah mencatat perdebatan yang sedang berlangsung seputar peran pendidikan agama di sekolah umum dan tantangan dalam menjaga netralitas sambil menghormati keberagaman agama. Penelitian terbaru juga mulai mengeksplorasi pengalaman siswa minoritas agama dalam mengakses pendidikan agama yang sesuai (Agbaria & Obeid Shehadeh, 2022; Daddow et al., 2021; Raihani, 2015; Rukiyanto et al., 2024). Namun, studi-studi ini sebagian besar fokus pada daerah perkotaan atau wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan.

Penelitian ini mengisi kesenjangan signifikan dalam literatur dengan meneliti fenomena guru Kristen yang memberikan pendidikan Islam di wilayah yang mayoritas Kristen. Sementara studi sebelumnya telah menyentuh tantangan dalam menerapkan kebijakan pendidikan agama di lingkungan yang beragam, kasus khusus guru non-Muslim yang mengadakan kelas pendidikan Islam untuk siswa Muslim minoritas masih sebagian besar belum dieksplorasi. Kesenjangan ini sangat signifikan mengingat implikasi potensial untuk hak agama siswa, kualitas pendidikan, dan hubungan antaragama.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya pada konteks pendidikan unik yang menantang pemahaman konvensional tentang pendidikan agama di Indonesia. Dengan mengeksplorasi praktik di Sekolah A dan Sekolah B (nama sekolah disamarkan), studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan nasional dinegosiasikan dan diadaptasi dalam konteks lokal dimana sumber daya dan demografi menghadapi tantangan signifikan dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang peran pendidik dalam menavigasi batas-batas agama dan mempromosikan pemahaman antar agama dalam pengaturan pendidikan.

Pentingnya manuskrip ini bersifat multifaset. Pertama, ia berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang pendidikan agama dalam masyarakat pluralistik, menawarkan bukti empiris tentang tantangan dan adaptasi yang terjadi di tingkat lokal. Kedua, ia memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan administrator pendidikan yang berurusan dengan penerapan kebijakan pendidikan agama dalam konteks yang beragam. Ketiga, ia mengungkap pengalaman siswa minoritas agama dalam mengakses pendidikan yang menghormati hak konstitusi dan identitas agama mereka. Akhirnya, penelitian ini memiliki implikasi yang lebih luas untuk memahami bagaimana keberagaman agama dinegosiasikan dalam pengaturan pendidikan, berpotensi memberi informasi tentang pendekatan untuk mempromosikan toleransi dan dialog antaragama di masyarakat pluralistik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana guru Kristen mengajarkan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara, di mana siswa Muslim merupakan minoritas, dengan fokus pada implikasinya terhadap kualitas pendidikan, hak beragama siswa, dan hubungan antar agama. Melalui penelitian kami, kami berusaha untuk mengeksplorasi alasan di balik penugasan guru Kristen untuk mengajar studi Islam di sekolah-sekolah ini.

Penelitian ini berada dalam konteks yang lebih luas dari upaya Indonesia untuk menyeimbangkan identitas agama dengan persatuan nasional. Seperti yang dicatat oleh Ambarita dan Ririhena (2022) dan Salihin (2021), pendekatan Indonesia dalam mengelola keberagaman agama telah ditandai oleh akomodasi dan regulasi, dengan pendidikan memainkan peran penting dalam upaya penyeimbangan ini. Fenomena yang diamati di Provinsi Sulawesi Utara merupakan manifestasi unik dari ketegangan yang lebih luas ini, menawarkan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh komitmen Indonesia terhadap pendidikan agama dan pluralisme.

Lebih lanjut, studi ini berkontribusi pada kumpulan literatur yang berkembang tentang pendidikan agama di masyarakat plural. Sementara peneliti seperti (Gordon & Arnstein, 2017; Halafoff et al., 2018) telah mengeksplorasi model-model pendidikan agama yang mempromosikan pemahaman antar agama dalam konteks Barat, penelitian ini menawarkan perspektif dari negara dengan mayoritas Muslim non-Barat yang menghadapi isu serupa dalam kerangka budaya dan hukum yang berbeda.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Creswell, 2012; Fitrah & Luthfiyah, 2018; Yusanto, 2020) untuk menyelidiki fenomena guru Kristen yang mengajar PAI di wilayah minoritas Muslim di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Demi alasan privasi dan etika, nama-nama sekolah dalam penelitian ini telah dianonimkan (hal ini juga diminta oleh pihak sekolah). Kami menyebutnya sebagai Sekolah A (sekolah negeri) dan Sekolah B (sekolah swasta Kristen) untuk melindungi identitas lembaga, siswa, guru, dan masyarakat yang terlibat. Kedua sekolah tersebut berlokasi di Sulawesi Utara dan dipilih untuk penelitian ini karena pendekatan mereka yang unik terhadap pendidikan agama. Secara khusus, sekolah-sekolah ini menggambarkan situasi yang khas di mana guru-guru Kristen mengajarkan PAI kepada siswa Muslim. Penelitian ini dilakukan selama periode tiga bulan,

dari Maret hingga Mei 2024, yang memungkinkan pengamatan mendalam sepanjang paruh pertama semester. Anonimisasi nama-nama sekolah mengikuti protokol etika penelitian standar, yang memastikan bahwa meskipun temuan-temuan tersebut dapat berkontribusi pada wacana pendidikan yang lebih luas, privasi dan keamanan semua partisipan tetap terlindungi.

Data dikumpulkan melalui berbagai metode untuk memastikan triangulasi (Moon, 2019). Observasi (Cooper et al., 2004) partisipatif dilakukan di kelas PAI di kedua sekolah, memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran dan interaksi antar siswa serta antara siswa dan guru. Wawancara (Azad et al., 2021; Della Porta, 2014; Osborne & Grant-Smith, 2021) terencana tidak terstruktur dilakukan dengan kepala sekolah, guru PAI, siswa Muslim, rekan guru mata pelajaran lain, dan orang tua siswa. Teknik snowball sampling (Etikan, 2016; Naderifar et al., 2017) digunakan untuk mengidentifikasi informan tambahan. Dokumentasi (Husson et al., 2022; Loh et al., 2001), termasuk catatan sekolah, data siswa, dan dokumen kebijakan, juga dikumpulkan sebagai data sekunder.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber melibatkan pemeriksaan silang informasi dari berbagai informan, sementara triangulasi teknik membandingkan data yang dikumpulkan melalui berbagai metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengorganisir data yang kompleks, mengidentifikasi tema-tema kunci, dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

Penelitian ini memberikan perhatian khusus pada etika penelitian, dengan memperoleh persetujuan yang tepat dari pihak sekolah, menjaga identitas sekolah dan menjaga kerahasiaan informan. Keterbatasan penelitian, seperti fokus pada hanya dua sekolah di satu wilayah geografis. Namun, studi kasus mendalam ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di tingkat lokal dan implikasinya terhadap hubungan antaragama di Indonesia.

Landasan Teori

Penelitian ini didasari oleh tiga landasan teori utama. *Pertama*, teori konstruktivisme sosial Vygotsky (1997) dan Lombardo & Kantola (2021) yang menekankan bahwa pembelajaran merupakan proses sosial di mana siswa mengkonstruksi pengetahuan melalui

interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Dalam konteks pendidikan agama, teori ini menyoroti pentingnya peran guru sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai zona perkembangan proksimal (*zone of proximal development*) dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai agama. Guru agama tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai model dan pembimbing yang membantu siswa mengkonstruksi pemahaman agama yang bermakna dan kontekstual.

Kedua, penelitian ini menggunakan teori disonansi kognitif yang dikembangkan oleh Festinger dalam beberapa publikasinya (1954, 1957), Festinger et al., (1956), Festinger & Carlsmith (1959) dan Nikula et al. (2023). Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menghadapi dua atau lebih kognisi yang bertentangan, mereka akan mengalami ketidaknyamanan psikologis yang memotivasi mereka untuk mengurangi disonansi tersebut. Dalam konteks pembelajaran PAI oleh guru non-Muslim, siswa mungkin mengalami disonansi antara keyakinan agama mereka dengan latar belakang agama guru yang mengajar, yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai agama.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Bian (2020) dan Gilead (2019, 2023), yang menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan agama diterapkan di wilayah dengan demografi agama yang berbeda dari mayoritas nasional, dan bagaimana ketersediaan guru agama yang kompeten dapat mempengaruhi kualitas pendidikan agama yang diterima oleh siswa minoritas.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi tema pendidikan agama dalam konteks masyarakat plural. Studi yang dilakukan oleh Agbaria dan Obeid Shehadeh (2022), Daddow et al. (2021), dan Raihani (2015) mengungkapkan bahwa siswa minoritas agama sering menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinan mereka. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan nasional menjamin hak pendidikan agama, implementasinya di tingkat lokal sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kompleksitas demografis.

Ambarita dan Ririhena (2022) dan Salihin (2021) secara spesifik meneliti pendekatan Indonesia dalam mengelola keberagaman agama melalui sistem pendidikan. Studi mereka

mengungkapkan bahwa pendekatan Indonesia ditandai dengan akomodasi dan regulasi, di mana pendidikan memainkan peran penting dalam menyeimbangkan identitas agama dengan persatuan nasional. Namun, studi-studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, terutama di wilayah dengan demografi agama yang berbeda dari mayoritas nasional.

Gordon dan Arenstein (2017) serta Halafoff et al. (2018) memberikan perspektif komparatif dengan mengeksplorasi model-model pendidikan agama yang mempromosikan pemahaman antar agama dalam konteks Barat. Meskipun dilakukan dalam konteks yang berbeda, penelitian-penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan inklusif dan dialogis dalam pendidikan agama untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman. Studi-studi ini juga menekankan peran krusial guru agama dalam memfasilitasi dialog dan pemahaman antaragama di lingkungan pendidikan yang plural.

Hasil dan Diskusi

Penelitian ini meneliti praktik guru Kristen dalam memberikan pendidikan Islam di dua sekolah menengah pertama di wilayah minoritas Muslim di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu SMP A (sekolah negeri) dan SMP B (sekolah swasta Kristen). Hasil penelitian akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan.

1. Faktor Penyebab Penugasan Guru Kristen pada Kelas Pendidikan Islam

Penugasan guru Kristen untuk mengajar Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP A dan SMP B yang mayoritas siswanya beragama Kristen menimbulkan diskusi menarik dalam perspektif kebijakan pendidikan, hak asasi manusia, dan hubungan antaragama. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 12 ayat 1(a) menjamin hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak ini masih menghadapi kendala di beberapa daerah.

Menurut Taufik (2020), pendidikan agama di sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk sikap moral dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, kualifikasi dan kompetensi guru agama menjadi faktor penting untuk memastikan kualitas pembelajaran agama. Jazadi menekankan pentingnya guru agama yang tidak hanya memiliki penguasaan materi, tetapi juga menjadi teladan dan fasilitator dalam menginternalisasi nilai-nilai agama.

Dalam konteks pembelajaran PAI, Kosim et al. (2023) berpendapat bahwa guru PAI harus memenuhi kualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan Islam dan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Guru PAI juga harus mampu menciptakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif.

Penugasan guru Kristen untuk mengampu PAI, meskipun dilakukan untuk memastikan keberlangsungan pembelajaran, perlu dikaji lebih lanjut dampaknya bagi siswa. Menurut teori perkembangan moral Kohlberg (1971), siswa pada usia remaja berada pada tahap konvensional di mana mereka mulai mengidentifikasi diri dengan aturan dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan guru agama yang seiman dapat menjadi model dan referensi moral yang penting bagi perkembangan identitas keagamaan siswa.

Pembelajaran agama oleh guru yang berbeda keyakinan juga berpotensi menimbulkan disonansi kognitif pada siswa. Festinger dalam beberapa publikasinya (1954, 1957), Festinger et al., (1956) dan Festinger dan Carlsmith, 1959) menjelaskan bahwa disonansi kognitif terjadi ketika terdapat inkonsistensi antara dua kognisi atau lebih, yang menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dan motivasi untuk mengurangi disonansi tersebut. Dalam kasus ini, siswa Muslim yang diajar PAI oleh guru Kristen mungkin mengalami disonansi antara materi agama yang dipelajari dengan figur otoritas yang menyampaikannya.

Namun di sisi lain, fenomena ini juga dapat dilihat sebagai peluang untuk mengembangkan toleransi dan dialog antaragama. Pembelajaran agama yang inklusif dan apresiatif terhadap keragaman dapat mendorong siswa untuk menghormati perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain (Baidhawry, 2013). Guru agama, terlepas dari latar belakang agamanya, dapat memerankan diri sebagai fasilitator yang mendorong sikap saling memahami dan kerja sama antarumat beragama.

Penugasan guru Kristen untuk mengajar PAI di SMP A dan SMP B perlu disikapi secara bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Dari segi pemenuhan hak siswa dan kualitas pembelajaran PAI, kondisi ini tentu tidak ideal dan perlu dicari solusi, misalnya dengan mengangkat guru PAI yang berkualifikasi atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam setempat. Namun di sisi lain, keberadaan guru Kristen di kelas PAI juga dapat menjadi momen untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, sepanjang guru tersebut memiliki pemahaman dan apresiasi yang baik terhadap Islam. Dialog antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan tokoh agama diperlukan untuk memastikan bahwa pembelajaran PAI

tetap berjalan optimal dan hak siswa terpenuhi, dengan tetap menjunjung semangat saling menghormati antar umat beragama. Tabel 1 berikut merangkum faktor-faktor utama yang memengaruhi kondisi pendidikan yang unik ini:

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penugasan Guru Kristen untuk Pendidikan Agama Islam

Aspek	Deskripsi Masalah	Teori/Hukum Pendukung	Implikasi
Kerangka Hukum	Hak siswa untuk menerima pendidikan agama dari guru yang seagama	UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, Pasal 12(1a)	Kesenjangan antara persyaratan hukum dan implementasi praktis
Kualifikasi Guru	-Membutuhkan gelar pendidikan Islam - Kompetensi yang diperlukan (pedagogik, personal, sosial, profesional, kepemimpinan) Dampak pada perkembangan identitas keagamaan siswa selama masa remaja	Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Kosim et al., 2023)	Tantangan dalam mencari guru Muslim yang berkualitas di daerah minoritas
Perkembangan Moral	Potensi ketidaknyamanan psikologis saat belajar konten keagamaan dari guru yang berbeda agama	Teori Perkembangan Moral (Kohlberg, 1971)	Kebutuhan akan guru seagama sebagai panutan moral
Dampak Kognitif	Peluang untuk mengembangkan toleransi dan dialog keagamaan	Teori Disonansi Kognitif (Festinger, 1954, 1957)	Siswa mungkin mengalami konflik antara materi pembelajaran dan otoritas guru
Hubungan Antaragama	- Merekrut guru pendidikan Islam yang berkualifikasi	Pendidikan agama berbasis multikultural (Baidhawiy, 2013)	Potensi dampak positif pada pemahaman antar agama
Solusi yang Direkomendasikan	- Berkolaborasi dengan lembaga Islam setempat - Memfasilitasi dialog antara	-	Kebutuhan untuk menyeimbangkan hak pendidikan dengan kendala praktis

pimpinan sekolah,
guru, orang tua, dan
tokoh agama

2. Evaluasi Konten dan Metode Pembelajaran PAI

Evaluasi terhadap konten dan metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diampu oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B menunjukkan adanya kesenjangan dengan standar kurikulum nasional. Meskipun guru tersebut mengikuti Kurikulum 2013 dan menggunakan buku teks PAI terbitan Kemdikbud, namun keterbatasan kompetensi guru berdampak pada pencapaian Kompetensi Dasar yang tidak optimal.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, mata pelajaran PAI di SMP diarahkan untuk menghasilkan siswa yang memiliki kompetensi pada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut meliputi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Keterbatasan penguasaan materi dan wawasan keislaman guru Kristen tentu menjadi kendala untuk mencapai kompetensi tersebut secara utuh.

Metode pembelajaran yang monoton seperti membaca, merangkum, dan mengerjakan soal juga kurang sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21 yang menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif (O'Connor et al., 2014). Dalam konteks pembelajaran PAI, O'Connor et al., (2014) dan Roth (1997) menekankan pentingnya penggunaan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, demonstrasi, simulasi, studi kasus, dan proyek untuk mendorong siswa mengkonstruksi pemahaman agama secara mandiri dan kontekstual.

Permintaan guru kepada siswa untuk mencari sendiri jawaban di internet atas pertanyaan yang tidak bisa dijawab juga perlu dievaluasi. Meskipun internet menyediakan beragam informasi keagamaan, namun tidak semuanya akurat dan sesuai dengan mazhab yang dianut. Tanpa bimbingan guru, siswa berpotensi menemukan informasi yang menyesatkan atau tidak sesuai dengan pemahaman mainstream (De Jong & Harper, 2005; Walker et al., 2004). Guru PAI idealnya menjadi fasilitator yang membantu siswa menavigasi sumber belajar secara kritis dan selektif.

Menurut teori konstruktivisme Vygotsky, pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai tingkat

perkembangan potensial (*zone of proximal development*) (Vygotsky, 1997). Dalam pembelajaran PAI, guru diharapkan mampu menjadi teladan, mentor, dan pembimbing yang mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi pemahaman agama yang kontekstual dan aplikatif, bukan sekadar transfer pengetahuan.

Konten dan metode pembelajaran PAI oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B belum sepenuhnya memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Keterbatasan kompetensi guru berdampak pada pencapaian kompetensi siswa yang tidak optimal, sementara metode pembelajaran yang cenderung pasif kurang mendorong pengembangan pemahaman agama yang kritis dan aplikatif. Meskipun niat penugasan guru Kristen di kelas PAI adalah memastikan keberlangsungan pembelajaran, namun hal ini perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kapasitas guru, pengayaan sumber belajar, dan pendampingan dari pihak yang kompeten. Kolaborasi dengan Kementerian Agama, perguruan tinggi Islam, atau organisasi keagamaan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di wilayah minoritas Muslim.

Berdasarkan pengamatan kelas dari Bulan Maret hingga Mei 2024, kami menemukan pola-pola khusus dalam cara guru-guru Kristen mengajarkan PAI di kelas-kelas. Di Sekolah A dan B, guru menggunakan metode berbasis ceramah, dengan 70% waktu kelas dihabiskan untuk membaca buku teks dan menyelesaikan tugas tertulis. Siswa sering diminta untuk meringkas teks-teks Islam tanpa terlibat dalam diskusi yang lebih mendalam tentang makna atau penerapan praktisnya. Kedua sekolah menunjukkan penerapan terbatas pada prinsip-prinsip pembelajaran aktif kurikulum, dengan penggunaan pembelajaran berbasis proyek, kegiatan pemecahan masalah, atau penilaian autentik yang minimal. Pengamatan terperinci tentang praktik pengajaran ini mengungkapkan tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh guru-guru non-Muslim dalam memberikan pendidikan agama Islam secara efektif, di luar analisis teoritis. Temuan ini menunjukkan perlunya program pengembangan profesional yang terarah dan sistem dukungan terstruktur untuk membantu guru-guru ini menjembatani kesenjangan antara persyaratan kurikulum dan implementasi kelas.

3. Perspektif Siswa, Orang Tua, dan Masyarakat tentang Pembelajaran PAI

Penerimaan siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B menggambarkan adanya adaptasi dan kolaborasi berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan pendidikan agama siswa Muslim

di wilayah minoritas. Meskipun kondisi ini tidak ideal, namun kompromi diambil dengan tetap memberikan pendidikan agama tambahan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sikap siswa yang menerima pembelajaran PAI oleh guru Kristen sambil menambah pengetahuan agama di luar sekolah mencerminkan adanya resiliensi dan adaptasi positif. Menurut teori resiliensi, individu yang resilien mampu bertahan dan bangkit kembali dalam situasi sulit dengan memanfaatkan sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki (Southwick et al., 2014). Dalam konteks ini, siswa memanfaatkan dukungan keluarga dan komunitas untuk melengkapi pembelajaran agama yang kurang optimal di sekolah.

Dukungan orang tua dengan memberikan pendidikan agama tambahan di rumah selaras dengan konsep pendidikan holistik yang menekankan peran keluarga sebagai pendidik utama dan pertama (Westerhoff, 2012). Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai agama dan membimbing perkembangan spiritual anak. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama juga terbukti meningkatkan hasil belajar dan moralitas siswa (Hendra et al., 2024).

Sementara itu, kontribusi masyarakat dengan membantu mengajar di masjid dan taman pengajian menunjukkan peran komunitas sebagai mitra sekolah dalam pendidikan agama. Epstein dan Sanders (2002) menekankan pentingnya kemitraan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif bagi siswa. Kolaborasi ini memungkinkan berbagi sumber daya, keahlian, dan tanggung jawab untuk mendukung perkembangan holistik siswa.

Harapan masyarakat akan adanya guru PAI yang kompeten di sekolah mencerminkan aspirasi terhadap pemenuhan hak pendidikan agama yang berkualitas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, guru agama harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana dan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ketersediaan guru agama yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran PAI yang optimal.

Penerimaan dan dukungan siswa, orang tua, dan masyarakat terhadap pembelajaran PAI oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B perlu diapresiasi sebagai bentuk resiliensi, adaptasi, dan kolaborasi dalam konteks keterbatasan. Namun kondisi ini hanya solusi sementara dan tidak menafikan tanggung jawab pemerintah dan sekolah untuk memenuhi hak siswa atas pendidikan agama yang berkualitas sesuai amanat undang-undang. Pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif untuk memastikan ketersediaan guru PAI yang kompeten di setiap sekolah, termasuk di wilayah minoritas Muslim. Sementara sekolah perlu

proaktif menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan agama yang saling menguatkan. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan kualitas pembelajaran PAI dapat terus ditingkatkan tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan siswa.

Tabel 2. Perspektif Pemangku Kepentingan tentang Guru Kristen yang Mengajar Pendidikan Agama Islam

Pemangku Kepentingan	Perspektif/Sikap	Strategi Adaptasi	Teori Pendukung
Siswa	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima situasi sambil mencari pengetahuan agama tambahan -Menunjukkan ketahanan dalam menghadapi tantangan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tambahan di luar sekolah -Pembelajaran mandiri melalui berbagai sumber 	Teori Ketahanan (Southwick et al., 2014)
Orang Tua	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami situasi sementara -Prihatin tentang kualitas pendidikan agama -Mendukung sambil mencari alternatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pendidikan agama tambahan di rumah - Terlibat dalam pembelajaran agama anak - Bekerja sama dengan sumber daya masyarakat 	Konsep Pendidikan Holistik (Westerhoff, 2012) Dampak Keterlibatan Orang Tua (Hendra et al., 2024)
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Aktif mendukung pendidikan agama siswa - Menyatakan harapan untuk guru Muslim yang berkualifikasi - Menunjukkan semangat kerja sama 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan program pendidikan berbasis masjid - Menyediakan kelas mengaji - Berbagi keahlian keagamaan dengan sekolah 	Kemitraan Sekolah-Keluarga-Masyarakat (Epstein & Sanders, 2002)

Tabel 2 mengungkapkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan (siswa, orang tua, dan masyarakat) mengembangkan mekanisme adaptasi yang konstruktif dalam menghadapi situasi di mana guru Kristen mengajar Pendidikan Agama Islam, dengan masing-masing kelompok menunjukkan resiliensi dan kreativitas dalam memastikan keberlangsungan pendidikan agama yang berkualitas, yang tercermin dari strategi-strategi seperti pembelajaran mandiri oleh siswa, pendidikan agama tambahan dari orang tua, dan program-program pendidikan berbasis masjid dari masyarakat, semua ini didukung oleh kerangka teoritis yang relevan seperti Teori Ketahanan dan Konsep Pendidikan Holistik.

4. Dampak Praktik Pembelajaran PAI bagi Pemahaman dan Sikap Beragama Siswa

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B memberikan dampak yang beragam bagi pemahaman dan sikap beragama siswa Muslim. Secara afektif, siswa menunjukkan toleransi dan kemampuan berinteraksi yang baik dengan teman berbeda agama. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan multikultural untuk mengembangkan kompetensi interaksi sosial lintas budaya dan agama (Aiman et al., 2023; Darnela et al., 2024; Hasyda et al., 2023; Maulidiah et al., 2023; Sairazi, 2024; Salim et al., 2023; Wahyono et al., 2022). Pengalaman berinteraksi dengan guru dan teman non-Muslim dalam lingkungan belajar yang plural dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.

Namun dari aspek kognitif dan psikomotorik, praktik pembelajaran PAI oleh guru Kristen tampaknya belum optimal dalam mencapai tujuan PAI yang holistik. Pemahaman siswa tentang PAI cenderung terbatas dan pemahaman agamanya minim. Dalam taksonomi Bloom yang direvisi (Anderson & Krathwohl, 2001; Wilson, 2016), aspek kognitif mencakup kemampuan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Keterbatasan pemahaman siswa menunjukkan bahwa pembelajaran PAI belum mencapai tingkatan kognitif yang lebih tinggi.

Sementara itu, temuan tentang siswa yang tidak bisa mengaji, tidak hafal bacaan shalat dan surat pendek, serta tidak bisa adzan, menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek psikomotorik. Menurut taksonomi psikomotorik dari Dave (1970), keterampilan psikomotorik mencakup tingkatan imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ketidakmampuan siswa dalam praktik ibadah dasar mengindikasikan bahwa pembelajaran PAI belum mengembangkan keterampilan psikomotorik secara memadai.

Kesenjangan pencapaian tujuan pembelajaran PAI ini dapat dikaitkan dengan kompetensi guru yang mengajar. Menurut Fajriana dan Aliyah (2019), guru PAI harus memenuhi syarat substantif yaitu menguasai ilmu agama Islam dan syarat metodologis yaitu menguasai metode pembelajaran PAI. Guru Kristen yang mengajar PAI, meskipun berusaha mengikuti kurikulum dan buku teks, tetap memiliki keterbatasan dalam penguasaan substansi dan metodologi PAI. Hal ini berdampak pada kedalaman dan keluasan materi yang disampaikan serta efektivitas metode pembelajaran yang digunakan.

Pembelajaran PAI oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B membawa dampak positif bagi pengembangan sikap toleransi dan kemampuan interaksi sosial siswa dalam konteks keberagaman. Namun praktik ini belum optimal dalam mencapai tujuan PAI secara utuh,

terutama pada aspek kognitif dan psikomotorik. Keterbatasan kompetensi guru dalam penguasaan substansi dan metodologi PAI berkontribusi pada kesenjangan pencapaian tujuan pembelajaran.

Meskipun demikian, fenomena ini perlu dilihat sebagai realitas pendidikan di wilayah minoritas Muslim yang memerlukan solusi kreatif dan kolaboratif. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu merumuskan kebijakan afirmatif untuk memastikan ketersediaan guru PAI yang kompeten di setiap sekolah. Sementara itu, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan Islam atau organisasi keagamaan untuk mendapatkan dukungan dalam pengembangan kapasitas guru dan penyelenggaraan pendidikan agama yang berkualitas. Dengan upaya strategis dan sinergis dari berbagai pihak, diharapkan pembelajaran PAI dapat terlaksana secara optimal dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya toleran tetapi juga memiliki pemahaman dan keterampilan agama yang mumpuni.

5. Refleksi Fenomena terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan Nasional

Fenomena pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B di Sulawesi Utara mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan nasional dalam konteks keragaman lokal. Secara legal formal, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 12 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 pasal 4 telah mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Namun dalam realitasnya, pemenuhan hak ini masih menghadapi tantangan di lapangan.

Menurut teori kontingensi struktural, efektivitas penerapan kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara karakteristik kebijakan dengan kondisi lingkungan implementasinya (Donaldson, 1999; Taylor & Taylor, 2014). Dalam konteks pendidikan agama, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Ketiadaan guru PAI di wilayah minoritas Muslim seperti Sulawesi Utara menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu diatasi.

Teori keadilan distributif menekankan pentingnya alokasi sumber daya yang adil dan merata untuk memastikan kesetaraan akses dan kualitas layanan publik (Miller, 2017). Dalam konteks pendidikan agama, disparitas ketersediaan guru PAI antara wilayah mayoritas dan minoritas Muslim mencerminkan ketimpangan distribusi sumber daya pendidikan.

Diperlukan kebijakan afirmatif untuk memastikan pemerataan guru PAI yang kompeten di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan minoritas.

Namun, implementasi kebijakan pendidikan agama juga perlu mempertimbangkan realitas keragaman sosial budaya dan agama di Indonesia. Menurut Kymlicka (1995), keragaman memerlukan pendekatan multikulturalisme yang mengakomodasi hak-hak kelompok minoritas sembari menjaga kohesi sosial. Dalam konteks pendidikan agama, diperlukan model pembelajaran yang inklusif dan dialogis, yang memungkinkan siswa untuk mempelajari agamanya sendiri sekaligus mengembangkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman agama.

Fenomena pembelajaran PAI oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B juga merefleksikan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam pemenuhan hak pendidikan agama. Menurut Ansell dan Torfing (2014), tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menghasilkan solusi inovatif dan kontekstual untuk masalah-masalah publik yang kompleks. Dalam konteks pendidikan agama di wilayah minoritas, sinergi antar pemangku kepentingan dapat melahirkan model-model pembelajaran alternatif seperti team teaching, guru tamu, atau pembelajaran berbasis masyarakat.

Sebagai penulis artikel ini, saya berpendapat bahwa fenomena pembelajaran PAI oleh guru Kristen di SMP A dan SMP B menunjukkan urgensi penguatan implementasi kebijakan pendidikan agama yang sensitif terhadap keragaman dan keadilan. Pemerintah perlu mengambil langkah afirmatif untuk memastikan ketersediaan guru PAI yang kompeten dan terdistribusi merata di seluruh wilayah. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan pengembangan model pembelajaran agama yang inklusif dan dialogis, yang mengakomodasi hak belajar siswa sekaligus menumbuhkan sikap saling memahami dan menghormati dalam keragaman.

Implementasi kebijakan pendidikan agama juga menuntut tata kelola kolaboratif yang melibatkan sinergi proaktif dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi kreatif dan kontekstual untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan agama yang berkualitas bagi setiap siswa, dengan tetap menghargai keragaman sosial budaya dan agama di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pendidikan agama tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga wahana penguatan toleransi dan kohesi sosial dalam keberagaman.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bagaimana guru Kristen mengajarkan pendidikan Islam di sekolah-sekolah di Sulawesi Utara yang jumlah siswa Muslimnya minoritas. Hal ini terjadi karena tidak cukup banyak guru Muslim yang berkualifikasi di daerah-daerah yang sebagian besar penduduknya beragama Kristen, sehingga sekolah-sekolah harus meminta guru-guru Kristen untuk mengajar mata pelajaran Islam. Meskipun para guru ini berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti pedoman pengajaran, mereka kesulitan untuk mengajarkan praktik-praktik Islam secara menyeluruh, terutama dalam hal ibadah dan doa sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan temuan yang menarik - para siswa menjadi sangat menerima agama yang berbeda, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Para orang tua dan anggota masyarakat memahami situasi yang sulit ini dan membantu dengan mengajarkan anak-anak mereka tentang Islam di rumah dan melalui kegiatan-kegiatan di masjid. Hal ini menunjukkan bagaimana keluarga-keluarga Muslim minoritas bekerja keras untuk menjaga pendidikan agama mereka tetap hidup meskipun menghadapi berbagai tantangan. Situasi ini menuntut perencanaan yang lebih baik untuk memastikan guru-guru Islam yang berkualifikasi tersedia di mana-mana di Indonesia khususnya di daerah yang penduduknya minoritas muslim. Ini juga merupakan contoh yang baik tentang bagaimana pendidikan dapat membantu berbagai kelompok agama saling memahami dengan lebih baik. Kasus unik ini menunjukkan bagaimana Indonesia berupaya melindungi hak setiap orang untuk mempelajari agama mereka sambil menghadapi tantangan-tantangan nyata dalam masyarakatnya yang beragam.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat baik sekolah yang menjadi lokasi penelitian maupun pimpinan kampus yang selalu memberikan dukungan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

Referensi

- Agbaria, A. K., & Obeid Shehadeh, H. (2022). "Minority within minority" or a "minority of two majorities": religious education and the making of Christian identity in Israel. *British Journal of Religious Education*, 44(3), 256–270.
- Aiman, U., Sudiana, I. N., & Putrayasa, I. B. (2023). Optimizing Reading Ability Through the CIRC Model Assisted by Story Card Media in the Context of Multicultural

- Education in Elementary Schools. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 185–194.
- Ambarita, J., & Ririhena, I. (2022). Mengelola Keragaman Agama di Lembaga Pendidikan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Ambon. *Dialog*, 45(1), 81–98.
- Andersland, I. (2019). *Religion education, religious and national identity and the purpose of education*.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition*. Addison Wesley Longman, Inc.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2014). *Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Anwar, K. (2021). Pancasila village, multicultural education and moderation of diversity in Indonesia. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 221–234.
- Azad, A., Sernbo, E., Svård, V., Holmlund, L., & Björk Brämberg, E. (2021). Conducting in-depth interviews via mobile phone with persons with common mental disorders and multimorbidity: the challenges and advantages as experienced by participants and researchers. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 11828.
- Bader, V. (2003). Religious diversity and democratic institutional pluralism. *Political Theory*, 31(2), 265–294.
- Baidhaw, Z. (2013). Building harmony and peace through multiculturalist theology-based religious education: An alternative for contemporary Indonesia. In *Peace education and religious plurality* (pp. 1–16). Routledge.
- Barnes, L. P., & Davis, A. (2015). *Religious education: Educating for diversity*. Bloomsbury Publishing.
- Bian, X. (2020). Employment mismatch from a distributive justice perspective. *European Journal of Training and Development*. <https://doi.org/10.1108/EJTD-01-2020-0012>
- Chia, P. S. (2022). Pancasila and covenantal pluralism in Indonesia: A historical approach. *Transformation*, 39(2), 91–98.
- Cooper, J., Lewis, R., & Urquhart, C. (2004). Using participant or non-participant observation to explain information behaviour. *Information Research*, 4–9.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Daddow, A., Cronshaw, D., Daddow, N., & Sandy, R. (2021). Strengthening inter-cultural literacy and minority voices through narratives of healthy religious pluralism in higher education. *International Journal of Inclusive Education*, 25(10), 1174–1189.
- Darnela, L., Sugitanata, A., & Mughits, A. (2024). Integrating Tyler and Banks' Theories in Curriculum Development: A Tracer Study Approach at UIN Sunan Kalijaga. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 86–102.
- Dave, R. H. (1970). *Developing and writing behavioural objectives*. Educational Innovators Press.

- De Jong, E. J., & Harper, C. A. (2005). Preparing mainstream teachers for English-language learners: Is being a good teacher good enough? *Teacher Education Quarterly*, 32(2), 101–124.
- Della Porta, D. (2014). In-depth interviews. *Methodological Practices in Social Movement Research*, 228–261.
- Donaldson, L. (1999). The normal science of structural contingency theory. *Studying Organizations: Theory and Method*, 51–70.
- Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2002). Family, school, and community partnerships. *Handbook of Parenting Volume 5 Practical Issues in Parenting*, 406.
- Etikan, I. (2016). Comparison of Snowball Sampling and Sequential Sampling Technique. *Biometrics & Biostatistics International Journal*. <https://doi.org/10.15406/bbij.2016.03.00055>
- Fajriana, A. W., & Aliyah, M. A. (2019). Tantangan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di era milenial. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 246–265.
- Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140. <https://doi.org/10.1177/001872675400700202>
- Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance Row. *Peterson and Company*.
- Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced compliance. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 58(2), 203–210. <https://doi.org/10.1037/h0041593>
- Festinger, L., Riecken, H. W., & Schachter, S. (1956). *When prophecy fails*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.1037/10030-000>
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Fraser, J. W. (2016). *Between church and state: Religion and public education in a multicultural America*. JHU Press.
- Fuhr, E. (1996). *Promoting Tolerance through Multicultural Education*.
- Gilead, T. (2019). Promoting Distributive Justice in Education and the Challenge of Unpredictability. *Studies in Philosophy and Education*. <https://doi.org/10.1007/s11217-019-09655-2>
- Gilead, T. (2023). Conceptualizing distributive justice in education: a complexity theory perspective. *Journal of Philosophy of Education*. <https://doi.org/10.1093/jopedu/qhad030>
- Gordon, S. C., & Arenstein, B. (2017). Interfaith education: A new model for today's interfaith families. *International Review of Education*, 63(2), 169–195.
- Halafoff, A., Arweck, E., & Boisvert, D. (2018). *Education about religions and worldviews: Promoting intercultural and interreligious understanding in secular societies*. Routledge.
- Hansen, O. H. B. (2013). Promoting classical tolerance in public education: what should we do with the objection condition? *Ethics and Education*, 8(1), 65–76.

- Hasyda, S., Putrayasa, I. B., & Sudiana, I. N. (2023). Integrating the Whole Language Approach in Multicultural Education: Developing Reading Comprehension Skills and Cross-Cultural Awareness in Elementary School Students. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 175–184.
- Hefner, R. W. (2000). Profiles in Pluralism: Religion and Politics in Indonesia. *THE PEW PROGRAM ON RELIGION AND THE NEWS MEDIA THE LEONARD E. GREENBERG CENTER FOR THE STUDY OF RELIGION IN PUBLIC LIFE TRINITY COLLEGE HARTFORD, CONNECTICUT*, 81.
- Hefner, R. W. (2018). *Routledge handbook of contemporary Indonesia*. Routledge.
- Hefner, R. W. (2021). Islam and institutional religious freedom in Indonesia. *Religions*, 12(6), 415.
- Hendra, H., Khozin, K., Irwan, I., & Anwar, S. (2024). Parent's Contribution to Strengthening Moral Awareness of Student Religiosity Behaviour. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 175–184.
- Husson, N. M., Trangenstein, P. A., & Ketel, C. (2022). Education to Improve Point of Care Documentation in Home Care Nurses: A Quality Improvement Project. *CIN - Computers Informatics Nursing*. <https://doi.org/10.1097/CIN.0000000000000811>
- Idris, F., Hassan, Z., Ya'acob, A., Gill, S. K., & Awal, N. A. M. (2012). The role of education in shaping youth's national identity. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 59, 443–450.
- Idrus, M. (2014). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. *El-Tarbawi*, 8(1), 69–75.
- Jackson, E., & Parker, L. (2008). "Enriched with Knowledge": Modernisation, Islamisation and the Future of Islamic Education in Indonesia. *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 42(1), 21–53.
- Kohlberg, L. (1971). *Stages of moral development as a basis for moral education*. Center for Moral Education, Harvard University Cambridge.
- Kosim, M., Muqoddam, F., Mubarak, F., & Laila, N. Q. (2023). The dynamics of Islamic education policies in Indonesia. *Cogent Education*, 10(1), 2172930.
- Kühle, L., Schmidt, U., Jacobsen, B. A., & Pettersson, P. (2018). Religion and state: Complexity in change. *Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries*, 81–135.
- Ladeur, K.-H. (2008). The myth of the neutral state and the individualization of religion: The relationship between state and religion in the face of fundamentalism. *Cardozo L. Rev.*, 30, 2445.
- Listia, L. A., & Gogali, L. (2007). Problematika Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006 (Problems in Religious Education in Schools: Results of Studies on Religious Education in the City of Yogyakarta 2004-2006). *Jogjakarta: Institut Dian Interfidei*.
- Loh, S., de Oliveira, P. M. J., & Leite Gastal, F. (2001). Knowledge discovery in textual documentation: Qualitative and quantitative analyses. *Journal of Documentation*. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007094>

- Lombardo, E., & Kantola, J. (2021). Social constructivism. In *The Routledge Handbook of Gender and EU Politics*. <https://doi.org/10.4324/9781351049955-5>
- Mamlok, D. (2023). The quest to cultivate tolerance through education. *Studies in Philosophy and Education*, 42(3), 231–246.
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1907–1919.
- Maulidiah, R. H., Nisa, K., Rahayu, S., Irma, C. N., & Fitrianti, E. (2023). Multicultural Education Values in the Indonesian Textbooks: A Critical Discourse Analysis. *Theory and Practice in Language Studies*. <https://doi.org/10.17507/tppls.1303.11>
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). Miles and Huberman Chapter 2. In *Qualitative Data Analysis*.
- Miller, D. (2017). Distributive justice: What the people think. In *Distributive justice* (pp. 135–173). Routledge.
- Moon, M. D. (2019). Triangulation: A method to increase validity, reliability, and legitimation in clinical research. *Journal of Emergency Nursing*, 45(1), 103–105.
- Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. *Strides in Development of Medical Education*. <https://doi.org/10.5812/sdme.67670>
- Nikula, P. T., Fusek, A., & van Gaalen, A. (2023). Internationalization of Higher Education and Climate Change: A Cognitive Dissonance Perspective. *Journal of Studies in International Education*. <https://doi.org/10.1177/10283153221145082>
- Nord, W. A. (2014). *Religion and American education: Rethinking a national dilemma*. UNC Press Books.
- Nurwanto, & Cusack, C. M. (2017). Addressing multicultural societies: lessons from religious education curriculum policy in Indonesia and England. *Journal of Religious Education*, 64(3), 157–178.
- O'Connor, E., McDonald, F., & Ruggiero, M. (2014). Scaffolding complex learning: Integrating 21st century thinking, emerging technologies, and dynamic design and assessment to expand learning and communication opportunities. *Journal of Educational Technology Systems*, 43(2), 199–226.
- Osborne, N., & Grant-Smith, D. (2021). In-Depth Interviewing. In *Methods in Urban Analysis* (pp. 105–125). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1677-8_7
- Prior, W., Mellor, S., & Withers, G. (2001). Promoting social tolerance and cohesion through education. Retrieved On, 12.
- Raihani, R. (2015). Minority right to attend religious education in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 1–26.
- Raihani, R. (2018). Education for multicultural citizens in Indonesia: policies and practices. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 48(6), 992–1009.
- Rosyada, D., & Nata, A. (2020). *Politik Pendidikan Agama di Sekolah: Studi Tentang Polemik Pendidikan Agama dalam Uu No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Roth, W.-M. (1997). The interaction of students' scientific and religious discourses: Two case studies. *International Journal of Science Education*, 19(2), 125–146.
- Rukiyanto, B. A., Christiani, T. K., & Almirzanah, S. (2024). Religious education to develop respect for plurality in Indonesia. *Journal of Beliefs & Values*, 1–16.

- Sacerdote, B., & Glaeser, E. L. (2001). *Education and religion*. National bureau of economic research Cambridge, Mass., USA.
- Saifuddin, A. (2015). Eksistensi kurikulum pesantren dan kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207–234.
- Sairazi, A. H. (2024). Enhancing Marriage Age Awareness through Comprehensive Sexuality Education: A Multicultural Approach in Rural Aluh-Aluh Besar, Kabupaten Banjar, Indonesia. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 5(1), 15–25.
- Salihin, N. (2021). Persilangan kultural dalam mengelola keberagaman pada masyarakat muslim-kristen Siringio-Ringo Sumatera Utara. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2).
- Salim, N. A., Adianto, S., & A'yuni, Q. (2023). Multicultural Learning Strategies to Improve Social Care Character at an Elementary School: A Case Study at Muhammadiyah 6 Elementary School North Samarinda. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 195–211.
- Schnabel, A., & Hjerm, M. (2014). How the religious cleavages of civil society shape national identity. *Sage Open*, 4(1), 2158244014525417.
- Southwick, S. M., Bonanno, G. A., Masten, A. S., Panter-Brick, C., & Yehuda, R. (2014). Resilience definitions, theory, and challenges: interdisciplinary perspectives. *European Journal of Psychotraumatology*, 5(1), 25338.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181–212.
- Taufik, M. (2020). Strategic role of Islamic religious education in strengthening character education in the era of industrial revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 20(1), 86–104.
- Taylor, A., & Taylor, M. (2014). Factors influencing effective implementation of performance measurement systems in small and medium-sized enterprises and large firms: a perspective from Contingency Theory. *International Journal of Production Research*, 52(3), 847–866.
- Vygotsky, L. S. (1997). The historical meaning of the crisis in psychology: A methodological investigation. *The Collected Works of LS Vygotsky*, 3, 233–343.
- Wahyono, S. B., Budiningsih, A., Suyantiningsih, & Rahmadonna, S. (2022). MULTICULTURAL EDUCATION AND RELIGIOUS TOLERANCE Elementary School Teachers' Understanding of Multicultural Education in Yogyakarta. *Al-Jami'ah*. <https://doi.org/10.14421/AJIS.2022.602.467-508>
- Walker, A., Shafer, J., & Iiams, M. (2004). Not in my classroom: Teacher attitudes towards English language learners in the mainstream classroom. *NABE Journal of Research and Practice*, 2(1), 130–160.
- Westerhoff, J. H. (2012). *Will our children have faith?* Church Publishing, Inc.
- Wilson, L. O. (2016). Anderson and Krathwohl--Bloom's taxonomy revised. *Understanding the New Version of Bloom's Taxonomy*.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1).
- Zambeta, E. (2000). Religion and national identity in Greek education. *Intercultural Education*, 11(2), 145–156.